

GERAKAN POPULISME ISLAM DAN DEMOKRASI INDONESIA: REFLEKSI DARI PILPRES 2019

ISLAMIC POPULISM AND INDONESIAN DEMOCRACY MOVEMENT: REFLECTIONS FROM THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION

Saepudin¹

^{1a} Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik, Universitas Djuanda.

^ACorrespondence: Saepudin, E-mail: muhtarsaepudin@gmail.com

(Received: 2024-03-28; Reviewed: 2024-03-29; Approved: 2024-04-30)

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkapkan bahwa refleksi dari Pilpres 2019, gerakan populisme Islam yang hanya dianggap sebagai ancaman (destruktif) terhadap demokrasi Indonesia merupakan pandangan kurang tepat, populisme Islam juga harus dipandang sebagai gerakan politik yang konstruktif, sebagai bentuk tuntutan terhadap keadilan dan kesejahteraan penduduk mayoritas. Sikap demikian merupakan bagian dari kontrol terhadap sistem demokrasi yang didasarkan pada pertimbangan aspek sosiologis maupun historis, bahwa notabene penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Merespon keberadaan populisme Islam di Indonesia harus dilakukan dengan memahami makna demokrasi, nilai-nilai dalam Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika secara utuh. Karena idealnya setiap gerakan politik yang memberikan sikap kritis harus dimaknai sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Kata kunci: Demokrasi, Pilpres 2019, Populisme Islam.

ABSTRACT

This research reveals that the reflection of the 2019 presidential election, the Islamic populism movement, which is only considered a threat (destructive) to Indonesian democracy, is an inappropriate view; Islamic populism must also be seen as a constructive political movement, as a form of demand for justice and welfare of the majority population. This attitude is part of the control of the democratic system, which is based on considerations of sociological and historical aspects that the majority of the Indonesian population adheres to Islam. Responding to Islamic populism in Indonesia must be done by fully understanding the meaning of democracy and the values in Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika. Because ideally every political movement that provides a critical attitude must be interpreted as part of democratic dynamics.

Keywords: Democracy, 2019 Presidential Election, Islamic Populism

Saepudin. (2024). Gerakan populisme islam demokrasi indonesia refleksi dari pilpres 2019. *Jurnal sosial humaniora*, 15(1), 88 - 103.

PENDAHULUAN

Politisasi simbol agama yang digunakan ketika perhelatan politik 2019 berimplikasi pada polarisasi dan menguatnya kebencian di tengah masyarakat. Pada Pilpres 2019 lalu, politisasi agama sangat terlihat jelas, hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan

simbol agama dari setiap tahapan pemilu. (Ronaldo & Darmaiza, 2021, hal. h. 34-48).

Selain itu, peran aktor juga sangat berpengaruh, khususnya aktor politik yang mampu memobilisasi masyarakat dengan kekuatan populisnya. Salah satu sebab kemunculan populisme ini karena adanya ketidakpuasan masyarakat atau publik

terhadap status quo, terjadinya ketidakadilan dan patologi sosial. Kemudian kondisi ini dijadikan sebagai alat untuk menyalahkan pemerintah karena tidak mampu bekerja dengan baik. (Hadiz, 2018, hal. 57).

Jika melihat kontestasi Pilpres 2019, Jokowi dan Prabowo keduanya melakukan gerakan populisme Islam dengan ciri dan karakter yang berbeda. Perbedaan populisme Islam Jokowi dan Prabowo terletak pada gaya kepemimpinan dan karakter kelompok pendukungnya. Jokowi yang berlatar belakang sipil memiliki gaya kepemimpinan humanis dan egaliter, menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan antarumat beragama, dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam menjaga stabilitas sosial di Indonesia yang notabene beragama Islam. Dengan *personal image* tersebut, Jokowi mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan muslim moderat. Dalam melakukan gerakan populisme Islamnya, Jokowi cenderung lebih moderat seperti penetapan 22 Oktober sebagai hari santri dan mendukung perbankan syariah yang lebih diterima oleh mayoritas muslim di Indonesia.

Sementara Prabowo adalah seorang purnawirawan militer yang terlahir dari keluarga *bangsawan*, berada pada lingkaran elite Orde Baru, maka gaya kepemimpinannya pun cenderung militeristik, tegas, dan terkesan sulit untuk bisa dekat dengan masyarakat bawah. Dalam perjalanannya, pada Pilpres 2019 Prabowo berduet dengan Sandiaga Uno yang mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk dari ormas Islam, selalu menyerukan perubahan tidak hanya kesejahteraan ekonomi atau sosial, tapi juga moralitas Islam. Mengutip bahasa Muhammad Rizieq Syihab yaitu "*Revolusi Akhlak*."

Revolusi ini berorientasi pada umat Islam. Pengertian "massa" dalam hal ini terbatas pada orang-orang yang meyakini cita-cita Islam. Sementara itu, yang tidak menganut cita-cita Islam yang sama dianggap sebagai oposisi.

Di negara demokrasi seperti Indonesia, terutama dalam mekanisme sistem politik, peran organisasi massa sangat penting dan dibutuhkan oleh negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam sistem politik peran organisasi massa dibagi dua, yaitu berperan sebagai *pressure group* dan *interest group*. Berdasarkan pembagian jenis kelompok ormas tersebut, organisasi seperti FPI termasuk ke dalam kategori kelompok kepentingan (*interest group*), yang dibubarkan tahun 2020.

Pembubaran FPI oleh Pemerintah tentu bukan tanpa alasan, sebagai organisasi yang berkepentingan (*interest group*), FPI memiliki sejumlah agenda politik yang bertentangan dengan pemerintah. Sekalipun sudah dibubarkan, para simpatisan dan eks pengurusnya tidak serta merta hilang begitu saja, mereka tetap eksis dan terus bergerak di masyarakat bawah (*grassroot*). Dampak dari pembubaran FPI tersebut juga memunculkan berbagai persepsi di masyarakat. Menurut penulis, sedikitnya terdapat dua persepsi yang muncul, yaitu persepsi positif dan negatif. Persepsi positifnya adalah masyarakat muslim masih memiliki kekuatan dalam mengawal negara. Sedangkan persepsi negatifnya menyebabkan terjadinya dekonstruksi kekuatan Islam menjadi kekuatan yang terpecah belah dan tidak terlihat secara utuh.

Indonesia telah merasakan momen bahwa Islam begitu kuat berpengaruh pada praktik politik dan kebijakan di publik, baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Begitupun dengan munculnya populisme Islam, terasa mempengaruhi wujud politik serta perilaku politik dari para elite dan rakyat. (Sihidi et al., 2020, hal. 174–189).

Gerakan populisme ini bergerak melalui multi-kanal, seperti media sosial. Kritik atau dukungan gerakan perubahan seringkali menimbulkan konvergensi simbolik dalam ruang siber dan menjadi *shared consciousness* (kesadaran bersama) dalam menyikapi berbagai persoalan pada kehidupan realita. Misalnya gerakan populisme Islam ketika perhelatan pemilihan gubernur DKI 2017,

terlihat jelas partai politik tidak mudah menentukan agendanya dalam menentukan calon. Saat itu muncul inisiatif perlawanan dari masyarakat sebagai bentuk kritik terhadap peranan ataupun fungsi partai politik. Dalam hal ini, politik kerelawanan memperkuat dan menjadi contoh kuatnya partisipasi masyarakat, terutama lewat jalur dunia maya, di mana masyarakat tidak hanya mengonsumsi berita, namun juga memproduksi serta mendesiminasikan ide maupun dukungan sehingga membentuk visi retorik bersama.

MATERI DAN METODE

Berdasarkan kajian peneliti, terdapat beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dan irisan dengan tema yang dibahas, di antaranya yaitu penelitian Vedi R. Hadiz, yang mengungkapkan bahwa trend politik global dari populisme Islam kini menjadi tantangan di sejumlah negara mayoritas Islam. (Hadiz, 2016, hal. 72).

Selain itu, penelitian Defbry Margiansyah menjelaskan bahwa peningkatan populisme di negeri ini ditandai dengan munculnya dua orang populis, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 dan terulang pada Pilpres 2019. (Margiansyah, 2019, hal. 47–68).

Sementara Sihidi dan kawan-kawan, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa populisme Islam cukup berkontribusi bagi kemenangan kandidat politik. Pada Pilpres 2019, sangat terlihat jelas para kandidat berusaha keras mengkapitalisasi Islam sebagai peningkat elektabilitas dan pendulang suara. (Sihidi et al., 2020, hal. 174–189).

Sedangkan penggunaan metode pada penelitian ini yaitu *case study*, sebuah metode untuk menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas. (Kusumastuti & Khoiron, 2019, hal. 8–9).

Metode studi kasus terdapat tiga jenis, yaitu studi kasus intrinsik, studi kasus instrumental, dan studi kasus kolektif. (Denzin & Lincoln, 2017, hal. 557).

Adapun jenis studi kasus yang dipilih dalam penelitian ini ialah studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*). Cara kerja metode penelitian studi kasus intrinsik di sini peneliti memeriksa secara rinci satu kasus atau kejadian dari fenomena yang ingin diteliti, yaitu gerakan populisme Islam dan demokrasi Indonesia dengan mengambil studi kasus instrinsiknya pada Pilpres 2019. Studi kasus intrinsik dilakukan karena kasus yang diteliti tersebut menarik perhatian, dan adanya adanya kompleksitas kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populisme Islam bisa berkembang karena adanya faktor-faktor yang menyebabkannya, yaitu pemimpin yang kharismatik, kesenjangan ekonomi, dan adanya politik identitas. (Kurniawan & AP, 2021, hal. 1065–1072).

Pemimpin Kharismatik

Populisme sering dimaknai negatif karena selalu melakukan emosionalisasi dan personalisasi politik, meski sering muncul di ruang politis. Karena massa yang begitu banyak sulit dimobilisasi jika tidak dikendalikan oleh figur pemimpin yang kharismatik. Sehingga peran pemimpin dalam populisme Islam sangat berpengaruh terhadap mobilisasi massa. (Hardiman, 2017, hal. 4).

Populisme secara luas digaungkan oleh para pemimpin kharismatik, karena kekuatan gerakan populisme tergantung pada pemimpinnya, walaupun banyak masyarakat yang terlibat.

Pemimpin yang kharismatik sangat menentukan keberhasilan sebuah gerakan populisme, karena akan mempengaruhi kondisi massa dengan arahan-arahannya, terutama seorang pemimpin kharismatik yang menyampaikn orasi penuh argumentasi yang tidak rasional, melainkan penuh slogan dan alasan sentimental yang membakar emosi massa.

Jika melihat kasus di Indonesia pada kontestasi Pilpres 2019, hal ini tercermin

pada sosok Prabowo Subianto yang mengusung tema perpaduan nasionalisme dan populisme yang kerap dilontarkan para politisi demagog di dunia. Dalam setiap pidato kampanyenya, ia selalu mengedepankan tema nasionalisme bahwa kekayaan alam Indonesia sudah sekian lama dieksploitasi oleh bangsa lain dan masyarakat hanya dijadikan “budak”. Selain itu, Prabowo kerap mengkritik elite politik yang dianggap korup dan egois.

Contoh lainnya terjadi pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Saat itu mobilisasi kekuatan muslim fundamentalis berhasil membukakan jalan kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno atas pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Banyak pengamat dan media menilai kekalahan pasangan Basuki-Djarot ialah indikator makin kuatnya populisme di Indonesia. (Kurniawan & AP, 2021, hal. 1065–1072).

Faktor penguat tumbuhnya populisme adalah pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut Ahok, dianggap menghina Islam karena mengutip Surat al-Maidah ayat 51 dengan tafsir berbeda. Mereka juga mengklaim penolakan keras dipimpin oleh gubernur yang tidak seiman. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya aksi protes 411 dan aksi 212.

Membuat gelombang demonstrasi anti Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan kekuatan massa besar tentunya bukanlah pekerjaan mudah. Hal ini membutuhkan figur yang kuat untuk menggerakkannya.

Tokoh utama populisme Islam di Pilkada DKI Jakarta bukanlah pimpinan partai Islam atau pimpinan organisasi keagamaan besar, melainkan tokoh FPI, Habib Rizieq Shihab yang menjadi tokoh sentral.

Habib Rizieq Shihab mengajak masyarakat menjadi muslim sejati

dengan menolak penoda agama. Model kampanye ini nampaknya berhasil mengidentifikasi muslim sejati dan muslim munafik. Umat Islam yang memihak Basuki Tjahaja Purnama dianggap munafik.

Dengan demikian, pemimpin kharismatik adalah gambaran bagi seorang pemimpin yang mampu memainkan jiwa dan irasionalitas pendukungnya. Kondisi tersebut terbentuk karena arahan-arahannya terhadap massa. Berikut foto hasil dokumentasi penulis terkait penampakan aksi massa 212 di Monas dari *Republika.co.id*.



Gambar 1. Aksi Massa 212

Kesenjangan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi justru mempertahankan keberlangsungan dominasi elite ekonomi, dengan mengandalkan kepemilikan kapital dan aset yang diperoleh dari privilese (seperti monopoli atau konsesi) yang diberikan penguasa sebelumnya, elite ekonomi (oligarki) lama tetap mendominasi ekonomi. Hal itu diperparah dengan pergeseran pemusatan kapital pada sektor “ekonomi baru” serta melambatnya ekonomi pada tahun-tahun terakhir yang kian memperlebar ketimpangan ekonomi. Meningkatnya ketimpangan ekonomi menjadikan lahan subur bagi kelompok populis, kontradiksi tersebut membuka jalan bagi kelompok populis untuk menjajakan gagasannya. (Djani, 2017, hal. 10–18).

Di sisi lain, globalisasi dan rezim ekonomi pasar mendikte warga menjadi kewarganegaraan pasar (*market citizenship*) yaitu interaksi, pertukaran dan kepemilikan yang berkaitan dengan aset, barang dan jasa ditentukan berdasarkan daya beli dan transaksi kapital (komodifikasi). Kepungan akumulasi kapital pada segelintir pengusaha, rezim ketenagakerjaan dan dunia pasar dalam bingkai globalisasi serta ekonomi pasar berdampak pada peningkatan kesenjangan pendapatan dan berujung pada meruncingnya kemiskinan.

Kerentanan dan kegamangan akibat globalisasi dan ekonomi pasar diperparah dengan berkurangnya program-program kesejahteraan sosial (*welfare program*), berupa perlindungan atau jaring pengaman sosial dan jaminan sosial kepada kelompok masyarakat tertentu, menyebabkan warga yang masuk dalam kategori rentan akan termarjinalkan secara ekonomi dan sosial. Surutnya program kesejahteraan sosial sebagai konsekuensi dari berkurangnya peran negara karena “diambil alih” oleh pasar atau dikarenakan menyurutnya kemampuan keuangan negara akibat krisis ekonomi atau akibat dari alokasi jaminan sosial pada kelompok masyarakat tertentu.

Beberapa pandangan yang mendukung tentang kesejahteraan sosial (*welfare program*), menganggapnya sebagai instrumen untuk menghemat pengeluaran kesejahteraan atau hak kesejahteraan. Sementara pihak lain melihatnya sebagai sarana untuk mendesain ulang kesejahteraan negara, agar lebih memungkinkan menghadapi peluang dan risiko baru yang ditimbulkan oleh ekonomi global. Namun, dari perspektif sosial demokrasi, ini bukan sekadar pertanyaan tentang desain ulang kebijakan, tetapi lebih kritis lagi tentang pemahaman ulang gagasan kesetaraan dan kebebasan dalam konteks yang mana program-program kesejahteraan saling

ketergantungan dan kompleks dengan sosial serta struktur ekonomi lainnya. Secara sederhana, demokrasi sosial baru memiliki orientasi normatif yang khas dan sangat berbeda dari sudut pandang utilitarian teori kesejahteraan konvensional. Tetapi adopsi pendekatan yang lebih baru ini tidak hanya membutuhkan sosiologi moral yang diperjuangkan oleh para ahli teori, tetapi dasar normatif yang lebih kuat serta dilengkapi dengan gagasan tentang kemampuan pemerintah. (Jayasuriya, 2006, hal. 39).

Adapun pengaruh dari perubahan struktur ekonomi dan dominasi rezim pasar mempengaruhi pembentukan identitas warga. Pertautan antara kegamangan dan situasi termarjinalkan tersebut dapat dielaborasi dengan tiga kondisi yang saling berhubungan.

Pertama, keamanan (*security*), yaitu keadaan terjaminnya kesejahteraan atau keselamatan. Sementara kegamangan (*insecurity*) adalah kekhawatiran akan keadaan dalam ketidakpastian akibat marginalisasi ekonomi yang dialaminya. (Vail et al., 1999, hal. 7).

Kedua, keamanan (*security*) adalah keyakinan diri dan keyakinan untuk mencapai tujuan seseorang, mampu 'mengamankan' beberapa hasil yang menguntungkan untuk kesejahteraan diri dan keluarga. Sementara kegamangan (*insecurity*) adalah perasaan putus asa, rasa diri terbatas atau keyakinan diri yang rendah akan jaminan kesejahteraan di masa depan.

Ketiga, keamanan (*security*), yaitu suatu kondisi stabilitas, ketika seorang individu memiliki harapan yang dapat diandalkan tentang kontinuitas dalam lingkungan dan hubungan mereka. Sementara kegamangan (*insecurity*) adalah perasaan ketidakpastian tentang masa depan, tentang pekerjaan dan posisi sosialnya.

Ketiga kondisi di atas terbentuk karena disebabkan relasi seseorang dalam sistem ekonomi yang tidak menjamin

kesejahteraannya. Kelompok masyarakat seperti itu memiliki risiko atas kejadian tertentu yang tidak dapat diprediksi dan tanpa perlindungan sosial. Dengan kata lain, kegamangan dalam kehidupan sehari-hari menempa seseorang dalam mengidentifikasi diri sebagai perlawanan terhadap kondisi sosial-ekonomi yang memarginalkannya. (Djani, 2017, hal. 10–18).

Oleh karena itu, program-program kesejahteraan perlu dirancang untuk berfokus pada partisipasi sosial yang mencerminkan langkah menuju paradigma kapabilitas dan kemandirian karena tujuan dari program-program ini adalah untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas, serta dapat memaksimalkan peranan penting masyarakat. Lebih lanjut, konstruksi identitas sosial akibat termarginalisasi rezim pasar, disebabkan karena adanya relevansi antara produk hubungan sosial atau identitas sosial yang merupakan pemaknaan karena dibentuk oleh situasi eksternal (kelompok atau individu).

Konstruksi identitas sosial atau munculnya gerakan populisme Islam yang disebabkan adanya kesenjangan ekonomi setidaknya muncul melalui tiga tahapan. *Pertama, legitimizing identity* atau melegitimasi identitas. Tahapan melegitimasi identitas yaitu lembaga yang mendominasi masyarakat dan mensahihkan dominasinya dihadapkan pada aktor sosial, sebuah tema yang penting bagi teori otoritas dan dominasi serta kompatibel dengan berbagai teori nasionalisme. (Castells, 2010, hal. 8).

Kedua, resistance identity atau identitas perlawanan. Tahapan ini diproduksi oleh aktor-aktor yang berada pada ihwal yang dipermalukan dan/atau distigmatisasi oleh logika dominasi sehingga menimbulkan resistensi.

Ketiga, project identity atau identitas proyek. Pada tahap ini, aktor sosial membuat identitas baru yang mendefinisikan kembali peran mereka

dalam masyarakat dan mengupayakan transformasi struktur sosial secara keseluruhan. Misalnya, ketika feminisme keluar dari parit perlawanan terhadap identitas perempuan dan hak-hak perempuan, untuk menentang patriarkalisme.

Politik Identitas

Proses terjadinya politik identitas keagamaan akan berdampak pada perubahan sosial dan di sisi lain penerapan identitas pada seseorang dapat mencerminkan atau mewakili dirinya atau suatu lembaga atas agama, suku, maupun kebangsaan. (Arief et al., 2021, hal. 2549–2556). Sebagaimana didekripsikan Calhoun dalam menjelaskan munculnya politik identitas, bahwa kategori identitas tertentu yang telah ditekan, didelegitimasi atau direndahkan dalam wacana publik, seperti pada tahun awal gerakan perempuan terhadap dominasi laki-laki dan bahkan inisiatif kreatif untuk membangun sudut pandang perempuan, urgensinya menarik kesamaan. (Calhoun, 1994, hal. 17–18).

Adapun di Indonesia, karena negara multikultural. Kondisi ini dijadikan oleh para pemimpin populis untuk kepentingan elektoral. Misalnya, Anies Baswedan pernah menyampaikan sebuah pandangan bahwa bangsa Arab lebih dahulu mendeklarasikan NKRI, padahal Sumpah Pemuda lebih awal digaungkan oleh para pemuda Indonesia. (Kurniawan & AP, 2021, hal. 1065–1072).

Populisme Islam terjadi karena kecerdikan politisi populis dalam memanfaatkan kemarahan dan kekecewaan masyarakat, namun tidak bisa memberikan alternatif jalan penyelesaian masalah. Kemarahan yang dibalut emosi akhirnya menjadikan kebencian terhadap orang lain. Dengan ilusi harapan kebahagiaan masyarakat, politisi populis memantik perasaan

kegamangan dari ketidakamanan rakyat kecil untuk kepentingan elektoralnya.

Bersenyawanya politik identitas dengan populisme Islam di Indonesia, sebagai contoh tampilnya “Islam Politik” saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, yang memenangkan kontestasi politik elektoral. Pencapaian tersebut terlihat dari aliansi yang dibangun merupakan lintas kelompok, mulai dari kelompok perkotaan yang miskin, kelompok prekariat kelas menengah perkotaan, *petty bourgeoisie* (borjuasi kecil) dan para konglomerat.

Di sisi lain, krisis global yang terjadi tahun 2007-2008 telah mendiskreditkan neoliberal/*market fundamentalism* dan hingga kini belum ada “model” alternatif pengganti sistem ekonomi pasar. Kondisi krisis itu justru dimanfaatkan oleh gerakan populisme Islam, baik ultra-nasionalis maupun kelompok intoleran untuk memobilisasi sentimen dan dukungan massa. (Djani, 2017, hal. 10-18).

Para elite saling berkompetisi untuk memenangkan kontestasi elektoral. Mereka menawarkan program-program populis dan mengadopsi langkah-langkah pro-kaum miskin, populis atau mengkooptasi para pemimpin bereputasi untuk mendapatkan suara tambahan dari pemilih. (Fukuoka & Djani, 2016, hal. 204-221). Misalnya kelompok organisasi sosio-religius muslim yang direpresentasikan oleh Front Pembela Islam (FPI), saat itu gencar berkampanye melawan Ahok yang dicap menista agama. Politik identitas para pesaingnya akhirnya mampu memobilisasi massa untuk menggulingkannya. (Djani et al., 2017, hal. 31-32).

Jika melihat dinamika politik yang terjadi selama Pilpres 2019, menunjukkan menguatnya politik identitas, khususnya agama dalam menentukan pilihan partisan pemilih. Hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), menunjukkan bahwa Joko Widodo (Jokowi) dikalahkan oleh lawannya,

Prabowo Subianto (Prabowo), di daerah-daerah yang memiliki akar rumput kuat Islam politik. Sedangkan Joko Widodo mengungguli suara di wilayah yang memiliki basis Islam moderat seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, atau daerah-daerah mayoritas non muslim yang secara politik menerima Islam moderat, seperti; Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali dan Sulawesi Utara. Sementara Prabowo unggul di daerah-daerah yang berbasis keislaman kuat; seperti Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh dan Banten. (Sihidi et al., 2020, hal. 174-89). Hasil tersebut, menunjukkan bahwa identitas memainkan peran penting dalam pemilu. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pemilih Indonesia terpolarisasi sepanjang garis identitas pada pemilu 2019. (Hanan, 2020, hal. 15-25).

Politik identitas dan populisme Islam dalam dinamika politik elektoral mulai menggeliat sejak pemilu 2014 dan menguat pada Pilpres 2019, karena dalam dua pemilu ini isu agama banyak dimainkan oleh para kontestan dan pendukungnya. Koalisi yang mendukung presiden petahana (Jokowi) itu berasal dari wilayah yang secara tradisional diasosiasikan dengan bentuk Islam yang lebih moderat, sementara lawannya (Prabowo) memasuki wilayah dengan budaya politik yang lebih Islamis. (Fossati, 2019, hal. 119-148). Dengan demikian, dinamika pada kontestasi pemilihan presiden tahun 2014, khususnya tahun 2019 membuktikan adanya kebangkitan politik identitas.

Politik identitas merupakan pemanfaatan jenis keadaan khusus atau identitas orang atau golongan terhadap lawan tanding politik, seperti pada pemilihan umum. Identitas agama merupakan salah satu pengaruh paling kuat dari perilaku politik, sehingga menjadikannya sangat penting dalam politik identitas. Narasi dan isu dalam kampanye pemilu khususnya tahun 2019

memberikan petunjuk tentang pemanfaatan isu-isu terkait identitas untuk menggambarkan satu kandidat lebih dekat atau tidak lebih dekat dengan identitas tertentu dan kandidat lainnya di pihak lawan.

Pemilu sering dianggap sebagai arena pertarungan identitas, sehingga polarisasi terbentuk pada kontestasi elektoral yang sifatnya *head to head* (*bipolar competition*), dan dapat dianggap sebagai kondisi yang mempertaruhkan identitas. Dalam kasus Indonesia, kehadiran kondisi ini lebih lemah di pemilu legislatif dan relatif lebih kuat di pemilihan presiden 2019.

Berbeda dengan pemilihan presiden, persaingan pada pemilu legislatif bersifat multipolar, bukan bipolar (*head to head*), karena persaingan semacam ini sulit untuk menggambarkan keberpihakan suatu partai politik pada satu agama tertentu. Akan lebih sulit lagi untuk menggambarkan lebih dari dua puluh ribu calon legislatif sebagai satu identitas atau lainnya. (Hanan, 2020, hal. 15–25). Singkatnya, kepentingan identitas yang relatif kurang signifikan di legislatif dibandingkan pemilihan presiden juga menyiratkan bahwa politik identitas lebih terkait dengan persaingan sengit atau polarisasi mendalam antara Jokowi dan Prabowo (*head to head*).

Contoh lain terlihat pada Pilkada DKI 2012 lalu, pada putaran kedua antara gubernur petahana Fauzi Bowo yang menggandeng Nachrowi Ramli dari etnis Betawi *versus* pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai perpaduan identitas etnis Jawa-Solo dan etnis Tionghoa dari Belitung Timur, Sumatera. (Sabarudin, 2021, hal. 111–125).

Wacana politik identitas kerap dijadikan cara untuk mengadvokasi pencapaian politik. Selain itu perebutan politik identitas Islam dapat membawa perubahan terhadap prosedur atau mekanisme di dalam internal partai dan

penafsiran kembali nilai-nilai partai ke arah yang lebih sesuai terhadap lingkungan politiknya. (Mayrudin & Akbar, 2019, hal. 283–288).

Dengan demikian, konsep politik identitas keagamaan merupakan simbol dari praktik politik, implementasinya untuk merangkul simpati umat. Karena kekuatan agama diyakini dapat merekatkan individu dalam ikatan kebersamaan yang sangat kokoh.

Kebutuhan dukungan pemilih yang lebih luas mendorong para elite untuk bernegosiasi dengan rakyat serta menawarkan harapan atau program sesuai dengan kepentingan massa yang lebih luas. (Djani et al., 2017, hal. 78). Selain itu, tata kelola pemerintahan yang buruk serta ketidakmampuan dalam menyuguhkan jaminan sosial secara luas, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan atau properti dan lain sebagainya, menyebabkan adanya pandangan bahwa masyarakat mendapatkan perlakuan tidak adil oleh elite penguasa. Hal tersebut akan mengkristalkan identitas kolektif berdasarkan ikatan primordial, seperti ikatan agama Islam di Indonesia. Kaum mayoritas yang termarginalkan tersebut menghasilkan identitas kolektif baru yang mendukung gagasan pemimpin populis dan kharismatik.

Gerakan Populisme Islam dalam Demokrasi Indonesia: Refleksi Pilpres 2019

Pesta demokrasi lima tahunan pada pemilu 2019 memang telah usai, namun strategi kemenangan dan dialektika gerakan populisme Islam yang digunakan oleh kedua kontestan meninggalkan jejak dan berimplikasi terhadap penurunan Indeks Demokrasi di Indonesia pada tahun 2020, sebagaimana yang telah diurai pada bab sebelumnya.

Salah satu warisan yang ditinggalkan pasca Pilpres 2019 yaitu menguatnya populisme Islam di era *post-truth*. Era

yang dikenal dengan pentingnya informasi yang objektif.

Pada Pilpres 2019, kedua pasangan calon memanfaatkan emosi massa Islam dengan caranya masing-masing, Mengaitkan Prabowo-Sandi dengan Aksi Massa Bela Islam pada Pilkada DKI Jakarta tidaklah berlebihan, begitu pun mengaitkan massa *Nahdliyin* sebagai representasi Islam Moderat dengan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sangat erat hubungannya saat Pilpres 2019 lalu, karena selama ini Joko Widodo dikenal dekat dengan warga NU ditambah lagi dengan pemilihan Ma'ruf Amin sebagai calon wakilnya saat itu. Perebutan konstituen Islam juga menjadi konsen keduanya, jika pasangan Prabowo-Sandi menggunakan ormas Islam seperti Muhammadiyah, kader Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional, serta massa simpatisan Aksi Bela Islam di Monas, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperjuangkan konstituen massa Islam pada akar rumput, dengan mendekati gerbong organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) sebagai perwakilan dari muslim moderat di Indonesia.

Implikasi gerakan populisme Islam terhadap demokrasi Indonesia pada Pilpres 2019 yang cenderung bersifat destruktif, yaitu karena, *pertama*, diskriminasi dan alienasi yang pada gilirannya memicu mobilisasi massa. *Kedua*, kekecewaan terhadap praktik politik demokrasi yang tidak memihak pada umat Islam dan berimplikasi pada sentiment politik berbalut hasrat serta kepentingan yang tidak tersampaikan secara tuntas pada ranah politik formal dan ikut berperan melahirkan praktik intoleransi terhadap elemen masyarakat lainnya. *Ketiga*, para pengikut relatif mengikuti patron para aktor populisnya. Kondisi tersebut membuat populisme Islam berpotensi dipengaruhi atau dikuasai oleh kepentingan yang sesungguhnya bukan perjuangan Islam. (Jati, 2017, hal. 133–151).

Seperti pada masa pra-kemerdekaan, spirit dalam Islam jelas menjadi perjuangan pemersatu dan pembentuk identitas nasional dalam rangka melawan kolonialisme, meskipun diwarnai perdebatan panjang tentang dasar negara berdasarkan Islam atau kebangsaan (nasionalisme), tetapi akhirnya dapat dikompromikan dengan lahirnya Pancasila. Gerakan populisme Islam pada Pilpres 2019 cenderung mengalami apa yang disebut sebagai *political distrust* (ketidakpercayaan politik). Padahal *political trust* (kepercayaan politik) pada institusi politik dan negara merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan demokrasi yang baik.

Kepercayaan politik seperti itu ialah bagian dari kapital atau modal sosial, yaitu kepercayaan terhadap parlemen, pemerintah dan sistem hukum di suatu negara. (Putnam, 2002, hal. 51). Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tersebut dapat terlihat dari:

Adanya keinginan untuk mendukung partai politik, yang sesuai dengan aspirasinya, sekaligus menghormati partai politik lain dan pendukungnya yang memiliki langkah dan pilihan politik yang berbeda;

Mengikuti Pemilihan Umum baik Pemilihan Eksekutif maupun Pemilihan Legislatif karena mempercayai otoritas dan netralitas Lembaga Penyelenggara Pemilu;

Kepercayaan pada kewenangan lembaga negara. Dapat dilihat dari kesediaan untuk menerima keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tersebut atau untuk mematuhi prosedur hukum yang telah dibuat. (Basya, 2019, hal. 43–59).

Setidaknya ada tiga cara agar kualitas pemerintahan demokratis hadir sebagai modal sosial agar tumbuhnya kepercayaan masyarakat. *Pertama*, anggota partai politik, asosiasi, atau lembaga negara menjalankan fungsi kapasitas untuk mengatasi konflik

internal dan berkontribusi pada pemeliharaan kehidupan berserikat serta adanya kemampuan untuk melakukan penilaian yang baik. Sejauh asumsi ini tidak dianggap terlalu optimis, jelas akan dianggap sebagai kontribusi yang menguntungkan bagi kualitas pemerintahan yang demokratis.

Kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif untuk warga, meningkatkan kemandirian semua orang yang mendapat manfaat dari barang dan jasa. Semakin baik barang dan jasa diproduksi dan semakin merata didistribusikan oleh pemerintah, maka semakin kecil kemungkinan hubungan antara negara dengan warga berubah menjadi hubungan ketergantungan. Oleh karena itu, asosiasi yang kuat dan padat dapat membantu mengimunisasi warga dari seruan populis dan bahaya lain dari "politik yang memobilisasi massa." Selain itu, semakin sedikit yang harus dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat menjalankan fungsi inti mereka dalam melindungi kehidupan dan kebebasan warga negara.

Ketiga, efek menguntungkan seperti tersebut di atas, masih perlu pertimbangan terhadap pengamatan segmen penduduk yang kurang beruntung (misalnya, kelompok berpenghasilan rendah, kurang berpendidikan, perempuan, pengangguran dan sejenisnya). Sehingga, struktur hukum dan kelembagaan pemerintah serta prinsip dasar kewarganegaraan harus diterapkan secara utuh. (Putnam, 2002, hal. 234–236).

Sebab salah satu penyebab menguatnya gerakan populisme Islam di negeri ini tidak lepas dari implikasi disparitas struktural ekonomi. Oleh karena itu, para aktor politik memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan identitas "ummat" untuk mencapai kepentingannya dan pada akhirnya fenomena populisme Islam

tidak jauh dari sekedar bentuk politik pragmatis yang digunakan oleh kelompok oligarki atau elit ekonomi politik untuk memperoleh kekuasaan. (Jayanto, 2019, hal. 1–25).

Pergerakan politik yang mengatasnamakan Islam merupakan wacana yang selalu menjadi salah satu topik perdebatan, seperti, apakah dalam agama Islam cocok dengan sistem demokrasi? Argumentasi yang dibangun pasti ada celah ketidakpuasan deskripsi berdasarkan sudut pandang teologis, baik dari Alquran atau hadis yang berbicara tentang demokrasi secara komprehensif.

Selain itu, terdapat pecahan aliansi populisme Islam di Indonesia dan terlihat dari berbagai elemen gerakan Islam yang mengaku mewakili rakyat, yaitu antara yang menempuh jalur keras/konservatif dan kelompok yang cenderung moderat.

Sehingga agenda penataan kembali umat, pada ranah sosial, ekonomi dan politik, berdampak pada upaya peningkatan kesadaran umat Islam bahkan memobilisasi mereka untuk mencapai tujuan yang diidamkan. Karena merasa dasingkan dan didiskriminasi, umat Islam pada akhirnya melahirkan narasi kecewa melalui gerakan populisme Islam yang dimaknai sebagai respons terhadap gap ekonomi dan situasi politik yang represif serta memicu keresahan masyarakat secara masif di tingkat akar rumput. (Rubaidi, 2020, hal. 252–253).

Figur sentral yang mendukung kontestan Prabowo untuk menggerakkan populisme Islam adalah tokoh-tokoh yang semula hanya populer dalam kelompok organisasinya, seperti Rizieq Shihab (FPI) dan Bachtiar Natsir (GNPF-MUI), menjadi tumpuan mobilisasi populisme Islam dalam kancah politik nasional. Hal tersebut tidak hanya menggambarkan kegagalan fungsi representasi partai-partai Islam, tetapi juga membuka peluang meluasnya gerakan populisme Islam yang mudah dimobilisasi. Dialektika anti-komunisme, asing-aseng,

anti-Islam dan sebagainya direproduksi menjadi semacam jembatan simbolik yang mempertemukan kepentingan pragmatis antara Islamis dan oligarki. Bahkan, kelompok populis Islam juga tidak segan-segan membangun kemitraan pragmatis dengan konglomerat Cina non-muslim, yang dalam retorikanya sendiri berada di luar cakrawala subjek politik Islam (*ummat*).

Namun, artikulasi Islam pluralis atau toleran yang mengakui perbedaan politik justru secara tidak langsung memainkan logika eksklusivitas dan juga melanggengkan praktik politisasi identitas dan kepentingan kelompok oligarki. Mengingat fragmentasi dan instrumentalisasi elite oligarki merupakan salah satu ciri utama populisme Islam di Indonesia, maka kekhawatiran yang berlebihan atas menguatnya fenomena gerakan populisme Islam yang terus-menerus direproduksi, dapat menimbulkan ancaman untuk masa depan demokrasi di Indonesia karena mempertajam polarisasi sosial dan melahirkan bentuk-bentuk politik eksklusif lainnya.

Namun secara induktif, dari kacamata massa muslim, pergerakan populisme Islam bisa menjadi jembatan untuk mobilitas sosial ke atas atau setidaknya mempertahankan status sosial sebagai kelas menengah, karena walaupun era industri 4.0. banyak membuat kalangan menengah terdidik, tetapi tidak lantas membuat mereka mudah menggapai aspirasi politiknya dan masih banyak jumlah pekerja prekariat yang mengalami ketidakpastian, ketidakamanan, dan ketidakstabilan kerja.

Keadaan ekonomi yang memburuk, menjadikan prekariat berpotensi mengalami *kemarahan*, *anomie*, *kecemasan* dan *keterasingan*, keadaan yang dapat membuat mereka berkolaborasi menentang berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada mereka, atau dimobilisasi oleh

politikus populis. Kemarahan berasal dari frustrasi karena terhalang untuk memajukan kehidupan dari kekurangan. Prekariat merasa frustrasi bukan hanya karena ketiadaan rasa aman yang menyertainya, tetapi juga karena pekerjaannya tidak melibatkan konstruksi hubungan saling percaya yang dibangun dalam struktur atau jaringan yang bermakna. Prekariat juga tidak memiliki tangga mobilitas untuk didaki, membuat orang-orang mudah mengekspresikan diri dalam ruang politik.

Sedangkan *anomie* adalah perasaan yang lahir dari keputusan. Hal ini tentunya diintensifkan oleh prospek pekerjaan tanpa seni dan karir. *Anomie* berasal dari kelesuan yang terkait dengan kekalahan berkelanjutan, diperparah oleh kecaman yang dilontarkan politisi dan komentator kelas menengah yang mengecam mereka sebagai pemalas, tanpa arah, tidak layak, tidak bertanggung jawab secara sosial atau pandangan buruk lainnya. Sehingga ketika ada aktor yang mendekati para prekariat ini atas nama kesejahteraan rakyat akan lebih mudah diterima.

Kemudian *kecemasan* adalah ketidakamanan kronis dari rasa takut kehilangan apa yang mereka miliki, sehingga pikirannya tidak merasa aman dan stres akibat pengangguran merebak. Mereka terasing dari pekerjaannya dan perilaku mereka tidak pasti, bahkan terkadang putus asa.

Adapun *keterasingan* muncul karena mengetahui bahwa apa yang dilakukan seseorang bukan untuk tujuan sendiri, melainkan untuk orang lain. Termasuk perasaan dibodohi, dengan narasi bahwa prekariat harus bersyukur dan bahagia. Para prekariat diberitahu untuk bahagia akan tetapi tidak bisa melihat dari sisi kebahagiaannya. Mereka mengalami apa yang disebut sebagai 'pekerjaan yang gagal', karena dituntut merasakan kebahagiaan psikologis, walaupun realita kehidupannya memprihatinkan. Orang-

orang dalam keadaan seperti itu cenderung mengalami ketidaksetujuan sosial dan kurangnya tujuan, sehingga merasakan keterasingan dalam sosial.

Di Indonesia, para pekerja prekariat dapat ditemui di sektor informal maupun formal yang cenderung mengalami kemarahan, *anomie*, kecemasan dan keterasingan, umumnya merupakan bagian dari kondisi keseharian pekerja di Indonesia yang menurut data tahun 2021 menunjukkan bahwa proporsinya cukup besar, sebanyak 78,14 juta orang atau sebanyak 59,62%. (Allen, 2013, hal. 16). Tidak ubahnya juga dialami berbagai negara di Asia, disebabkan oleh tidak berhasilnya sektor formal menciptakan lapangan pekerjaan yang stabil. (Mudhoffir et al., 2017, hal. 48–59).

Saat dihadapkan pada kondisi yang tidak aman dan tidak stabil, pekerja *prekariat* dituntut untuk mengambil berbagai strategi untuk bertahan hidup. Seperti menjalin hubungan dengan kelompok yang menyediakan berbagai sumber daya untuk memperoleh akses pekerjaan, serta berbagai jenis bantuan sosial yang diperlukan ketika mengalami kesulitan. Di Indonesia, sumber daya tersebut antara lain disediakan oleh kelompok yang menggunakan simbol-simbol agama untuk menggerakkan anggotanya guna meraih keuntungan bisnis atau meraih kekuasaan.

Banyak masyarakat Indonesia, baik kalangan kelas bawah maupun menengah, khawatir kehilangan kesempatan yang akan diambil oleh anggota masyarakat lainnya. Adanya ketakutan dan kecemburuan yang ditimbulkannya menciptakan peluang bagi elemen masyarakat konservatif untuk mendorong visi alternatif mereka, sehingga timbul kelompok-kelompok Islam menggunakan ruang publik, merupakan hak yang dijamin bagi mereka di bawah sistem demokrasi, dalam rangka mensosialisasikan pandangan tentang cara hidup masyarakat Indonesia dan

nilai-nilai yang harus dicerminkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Hai, 2019, hal. 23–42).

Bagi kelas menengah, masuk ke dalam kelompok seperti *majelis taklim*, terutama di perkotaan dan memakai berbagai komoditas “Islam” adalah jawabannya, setidaknya dalam mempertahankan statusnya sebagai kelas menengah. Bahkan, sebagian dari mereka menjadikan partai politik Islam sebagai jawaban atas aspirasi politik mereka. Basis pengorganisasian semacam itu merupakan sumber mobilisasi politik kerakyatan yang dapat dibangun oleh para demagog dengan menggunakan narasi dan sentimen keagamaan dalam persaingan pemilu.

Namun perluasan kekuatan koersif di Indonesia berbalut keagamaan bukanlah bukti konklusif bahwa demokrasi telah memasuki kemerosotan yang tidak dapat diubah, karena Indonesia masih berproses untuk mengembangkan proses demokrasinya dan menemukan keseimbangan yang dapat diterapkan antara kebebasan individu dan kontrol negara. Dalam konteks Indonesia, telah menjadi dasar banyak tulisan dan perdebatan tentang masalah ini di masa lalu. Alih-alih mengambil bentuk proses yang berantakan dan seringkali kontradiktif yang mana beragam pemangku kepentingan bersaing satu sama lain untuk memajukan agenda, kepentingan, dan nilai mereka. (Guild, 2019, hal. 5–21).

Di samping itu, ketika institusi pemerintahan demokratis sedang berjuang untuk memenuhi janji-janji dasar kontrak sosial kepada rakyatnya, seorang demagog populis bisa membantu pemerintahan walaupun dengan cara menyalurkan politik identitas dan menawarkan stabilitas di bawah pemerintahan yang tampak menjadi alternatif yang menarik.

Pada jalan demokrasi, bangkitnya populisme sebagai gerakan politik

merupakan hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan norma atau nilai demokrasi. Menuntut keadilan melalui konfrontasi *vis-a-vis* antara umat Islam dengan elite penguasa yang dianggap korup merupakan hak sipil yang diperbolehkan pada ruang demokrasi di seluruh dunia, begitupun di Indonesia. Maka populisme Islam melaju dalam memperjuangkan agenda politiknya, terlebih menggunakan instrumen demokrasi, hal itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi. (Rubaidi, 2020, hal. 250–251).

Dalam sistem demokrasi, populisme Islam harus dilihat secara positif. Dalam arti, populisme tidak harus dipahami sebagai ancaman terhadap demokrasi, kendati tetap memberikan ruang untuk mengartikulasikan sikap kritis kepada populisme Islam. Sikap demikian dipilih atas pertimbangan sosiologis dan historis posisi Islam merupakan agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. (Arifin, 2019, hal. 9–28). Karena akar historis posisi umat Islam Indonesia yang mayoritas ini, dalam konteks politik kekuasaan bangsa selalu mengalami apa yang disebut sebagai kelompok mayoritas yang teralienasi dan terdiskriminasi. (Jati, 2017, hal. 19–27). Sikap merasa teralienasi dan diskriminasi yang dirasakan oleh '*ummat*' melahirkan narasi kekecewaan publik dalam populisme Islam yang diartikan sebagai respons terhadap alienasi ekonomi serta situasi politik represif yang memicu pergolakan publik secara masif di tingkat akar rumput.

Jika dilihat dari jumlah partisipasi pemilih pada Pilpres 2019, terjadi kenaikan signifikan, yakni sebanyak 11,97 persen dari tahun 2014 yang hanya mencapai 70 persen. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 merupakan partisipasi tertinggi selama Indonesia melaksanakan pemilu. Adapun Legislatif (DPR-RI) 2019 mencapai 81,69 %. (Statistik, 2019, hal. h. 28-30). Hal ini menandakan peningkatan pemilih sekitar 10 persen dibandingkan

pada tahun 2014, hanya mencapai 75,11 persen. (Nurhasim, 2014, hal. 31). Salah satu eskalasi keikutsertaan pemilih pada Pemilu tahun 2019 tidak lepas dari adanya Populisme Islam.

Maka reaksi berlebihan yang didasarkan pada pandangan akan ancaman penguatan populisme Islam hanya mengarah pada bentuk-bentuk eksklusivisme lainnya, mempertajam polarisasi sosial dan membuka kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk politik eksklusif lainnya. Maka, pergerakan populisme Islam di Indonesia, bukanlah bentuk kematian demokrasi, melainkan gagasan yang berkembang dari proses demokrasi yang sedang beraksi di negeri ini.

Maka pemahaman makna yang mendalam dari gerakan populisme Islam sebenarnya mengandung dua implikasi yang tumpang tindih terhadap demokrasi Indonesia pasca Pilpres 2019, yaitu *pertama*, gerakan kepentingan elektoral dengan memobilisasi massa muslim yang bertujuan hanya untuk mendulang suara dapat merusak tatanan demokrasi yang dijiwai oleh keanekaragaman (Bhineka Tunggal Ika). *Kedua*, mengandung implikasi gagasan dan gerakan politik yang wajar di negara demokrasi yang berorientasi pada pembangunan dan keadilan bagi masyarakat muslim Indonesia sebagai penganut agama mayoritas.

Kedua implikasi tersebut mengandung perbedaan sangat tipis dan perlu dilakukan kajian mendalam secara induktif agar populisme Islam tidak dipahami selalu destruktif, hanya dilihat dari aktor pemimpin yang memiliki kepentingan elektoral, namun juga harus dilihat dari posisi dan sudut pandang rakyatnya, dalam hal ini umat Islam.

KESIMPULAN

Gerakan populisme Islam dapat dipahami sebagai bentuk destruktif. Ada tiga alasan mengapa populisme Islam dalam

demokrasi Indonesia dapat dikatakan sebagai bentuk gerakan yang destruktif. *Pertama*, gerakan ini dapat mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional, hukum dan etika dalam mencapai tujuan politiknya. *Kedua*, retorika yang digunakan dalam gerakan ini seringkali mengandung elemen intoleransi terhadap kelompok-kelompok minoritas atau kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dan dapat menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat serta mengancam stabilitas sosial. *Ketiga*, gerakan ini dapat mengarah pada pembuatan kebijakan yang tidak rasional dan tidak selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Namun gerakan populisme Islam dalam demokrasi Indonesia juga dapat dikatakan konstruktif, karena gerakan ini sebagai ruang untuk mengaktualisasikan sikap kritis masyarakat terhadap kondisi bangsa yang tidak ideal (konstruktif). Sikap demikian merupakan bagian dari penguatan sistem demokrasi yang bertujuan menjaga stabilitas dan keutuhan negara yang didasarkan pada pertimbangan aspek sosiologis maupun historis, bahwa notabene penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, E. (2013). *Labour and Social Trends in Indonesia 2013: Reinforcing the role of decent work in equitable growth*. ILO.
- Arief, R., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). Understanding National Identity to Create Love and Proud of Being a Part of the Indonesian Nation. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2549–2556.
- Arifin, S. (2019). Islam, Populisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal MAARIF*, 14(1), 9–28. <https://doi.org/DOI:10.47651/mrf.v14i1.46>
- Basya, M. H. (2019). Populisme Islam, Krisis Modal Sosial dan Tantangan Terhadap Demokrasi: Refleksi Pemilu 2019. *Jurnal MAARIF*, 14(1), 43–59.
- Calhoun, C. (Ed.). (1994). *Social Theory and the Politics of Identity*. Blackwell Publishers.
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Wiley-Blackwell.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Ed.). (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research (Fifth)*. Sage Publications, Inc.
- Djani, L. (2017). Persenyawaan Politik Identitas dan Populisme: Tawaran Kerangka Analisis. In *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi, Edisi Bangkitnya Populisme dan Krisis Demokrasi*, Vol. 36, No. 3 (hal. 10–18). LP3ES.
- Djani, L., Törnquist, O., Tanjung, O., & Tjandra, S. (2017). *Dilemmas of Populist Transactionalism: What are the Prospects Now for Popular Politics in Indonesia?* PolGov Publishing.
- Fossati, D. (2019). The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 119–148.
- Fukuoka, Y., & Djani, L. (2016). Revisiting the Rise of Jokowi: The Triumph of Reformasi or an Oligarchic Adaptation of Post-Clientelist Initiatives? *South East Asia Research*, 24(2), 204–221.
- Guild, J. (2019). The Creeping Hand of the State in Post-Reformasi Indonesia: Is Democracy in Irreversible Decline? In *EXPLORATIONS: A Graduate Student Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 15 (hal. 5–21).
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hadiz, V. R. (2018). *Populisme Islam: di Indonesia dan Timur Tengah*. LP3ES.

- Hai, V. S. (2019). Transnationalism and Multi-dimensional Flow of Remittance in Cambodia. In *EXPLORATIONS: A Graduate Student Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 15 (hal. 23–42).
- Hanan, D. (2020). Identity Politics in the 2019 Indonesian General Elections: Its Significance and Limitation. *Jurnal Wacana Politik*, 5(1), 15–25.
- Hardiman, F. B. (2017). Kebangkitan Populisme Kanan dalam Negara Hukum Indonesia. In *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi, Edisi Bangkitnya Populisme dan Krisis Demokrasi*, Vol. 36, No. 3 (hal. 3–9). LP3ES.
- Jati, W. R. (2017). Trajektori Populisme Islam di Kalangan Kelas Menengah Muslim Indonesia. In *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi, Edisi Bangkitnya Populisme dan Krisis Demokrasi*, Vol. 36, No. 3. LP3ES.
- Jayanto, D. D. (2019). Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU). *Jurnal Filsafat*, Vol. 29(1), 1–25.
- Jayasuriya, K. (2006). *Statecraft, Welfare and the Politics of Inclusion*. Palgrave Macmillan.
- Kurniawan, I. D., & AP, H. A. (2021). Perkembangan Politik Populisme di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2(4), 1065–1072.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 47–68.
- Mayrudin, Y., & Akbar, M. C. (2019). Identity Politics Within Indonesian Islamic Parties: Study of PKB and PKS. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 367: Proceedings of the International Conference of Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA)*, 283–288.
- Mudhoffir, A. M., Yasih, D. W. P., & Hakim, L. (2017). Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia. In *Prisma: Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi, Edisi Bangkitnya Populisme dan Krisis Demokrasi*, Vol. 36, No. 32 (hal. 48–59). LP3ES.
- Nurhasim, M. (Ed.). (2014). *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia & Komisi Pemilihan Umum.
- Putnam, R. D. (2002). *Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society*. Oxford University Press.
- Ronaldo, R., & Darmaiza. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol. 3(1), 34–48. <https://doi.org/DOI:10.36256/ijrs.v3i1.150>
- Rubaidi. (2020). *Radikalisme Islam, Populisme, NU dan Masa Depan Demokrasi Indonesia di Era Post-Truth*. Lingkaran.
- Sabarudin, D. (2021). Political Communication Based on Identity Politics and Social Networking Media in the Periode 2012-2017 DKI Jakarta Governor Election. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, 9(2), 111–125.
- Sihidi, I. T., Roziqin, A., & Suhermanto, D. F. (2020). Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 174–189.
- Statistik, B. P. (2019). *Statistik Politik 2019*. Badan Pusat Statistik.
- Vail, J., Wheelock, J., & Hill, M. (Ed.). (1999). *Insecure Times: Living With*

Insecurity in Contemporary Society.
Routledge: Taylor & Francis Group.